

ANALISIS KENDALA DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL BERBASIS POTENSI DAERAH DAN KEARIFAN LOKAL

Yuniarti¹, Akhmad Muadin²

Abstrak: Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis potensi daerah dan kearifan lokal merupakan upaya untuk memperkuat identitas budaya serta memanfaatkan sumber daya lokal dalam pendidikan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat optimalisasi pengembangan kurikulum muatan lokal. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen terhadap guru, tenaga kependidikan, dan pemangku kebijakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Balikpapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama meliputi: (1) kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam muatan lokal Balikpapan, (2) keterbatasan sarana dan prasarana, serta (3) tidak adanya panduan kurikulum yang baku. Studi ini merekomendasikan perlunya pelatihan guru, penyediaan bahan ajar lokal, dan sinergi antara sekolah, pemerintah daerah, dan komunitas budaya untuk memperkuat implementasi kurikulum muatan lokal.

Kata Kunci: Kurikulum Muatan Lokal, Kearifan Lokal, Potensi Daerah, Kendala Pengembangan, Pendidikan Berbasis Budaya.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Dalam konteks Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, dan potensi daerah, kurikulum pendidikan tidak hanya harus bersifat nasional tetapi juga perlu mengakomodasi kekhasan lokal. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 37, yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat muatan lokal untuk mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan daerah.

Kurikulum muatan lokal dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal, potensi sumber daya alam, serta kebudayaan daerah ke dalam proses pembelajaran. Tujuannya adalah agar peserta didik tidak hanya memahami pengetahuan global tetapi juga memiliki kesadaran dan keterampilan yang sesuai dengan konteks lingkungan tempat mereka tinggal. Misalnya, di daerah pesisir, muatan lokal dapat berbasis pada kelautan dan perikanan, sementara di daerah agraris dapat fokus pada pertanian dan pengolahan hasil bumi.

Namun, meskipun memiliki landasan hukum yang kuat dan tujuan yang strategis, pengembangan kurikulum muatan lokal di banyak daerah masih belum optimal. Beberapa masalah yang sering muncul antara lain: (1) kurangnya pemahaman guru dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan materi berbasis kearifan lokal, (2) keterbatasan sumber daya seperti bahan ajar dan sarana pendukung, (3) lemahnya koordinasi antara sekolah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lokal, serta (4) tidak adanya standar baku yang memandu implementasi kurikulum muatan lokal di tingkat daerah.

Kondisi ini mengakibatkan banyak sekolah kesulitan merancang dan

mengimplementasikan muatan lokal secara efektif. Akibatnya, pembelajaran muatan lokal seringkali bersifat parsial, tidak terstruktur, dan bahkan hanya dijadikan sebagai pelengkap tanpa dampak signifikan terhadap penguatan identitas budaya maupun pemberdayaan potensi daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur atau kajian pustaka. Tujuan dari metode ini adalah untuk menganalisis Kendala dalam Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Potensi Daerah dan Kearifan Lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kurikulum

Menurut Ana Nurhasanah mengutip dari Badan Standarisasi Nasional SIN 19-7057-2004 Kurikulum adalah seperangkai mata pelajaran yang mempunyai tujuan tersebut melalui pengalaman belajar, diajarkan dengan cara dan metode tertentu serta dilakukannya evaluasi.¹

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 butir 19 menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, tujuan dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.²

Sedangkan menurut Nurul Huda mengutip dari A. Glattorn mendefinisikan kurikulum ialah rencana-rencana itu dibuat untuk membimbing dalam belajar disekolah biasanya meliputi dokumen, level secara umum, dan aktualisasi dari rencana-rencana itu dikelas, sebagai pengalaman murid yang telah dicatat dan ditulis oleh seorang ahli, pengalaman-pengalaman tersebut ditempatkan dalam lingkungan belajar yang juga mempengaruhi apa yang dipelajari.³ Kurikulum merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan, baik oleh pengelola maupun penyelenggara, khususnya oleh guru dan kepala sekolah.

Kurikulum dalam proses pendidikan memiliki fungsi sebagai sarana dalam mengukur kemampuan pribadi dan konsumsi pendidikan. Hal ini membuat kurikulum tidak dapat dilepaskan dari pengejaran target yang membuat peserta didik untuk dapat memahami berbagai materi dengan mudah, selain itu juga peserta didik bisa melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya.

Secara umum fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Kurikulum itu segala aspek yang mempengaruhi peserta didik di sekolah, termasuk guru dan sarana serta prasarana lainnya. Kurikulum sebagai program belajar bagi siswa, disusun secara sistematis dan logis, diberikan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagai program belajar, kurikulum adalah niat, rencana dan harapan.

Menurut Alexander Inglis, fungsi kurikulum meliputi :

1. **Fungsi Penyesuaian**, karena individu hidup dalam lingkungan, sedangkan lingkungan tersebut senantiasa berubah dan dinamis, maka setiap individu harus

¹ Nurhasanah, A., Pribadi, R. A., & Nur, M. D. (2021). Analisis kurikulum 2013. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 7(02), 484-493.

² Pasal 1 butir 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

³ Huda, N. (2017). Manajemen pengembangan kurikulum. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 52-75.

mampu menyesuaikan diri secara dinamis. Dan di balik lingkungan pun harus disesuaikan dengan kondisi perorangan, disinilah letak fungsi kurikulum sebagai alat pendidikan menuju individu yang well adjusted.

2. **Fungsi Integrasi**, kurikulum berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi. Oleh karena individu itu sendiri merupakan bagian integral dari masyarakat, maka pribadi yang terintegrasi itu akan memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan atau pengintegrasian masyarakat.
3. **Fungsi Deferensiasi**, kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan perorangan dalam masyarakat. Pada dasarnya deferensiasi akan mendorong orang berpikir kritis dan kreatif, dan ini akan mendorong kemajuan sosial dalam masyarakat.
4. **Fungsi Persiapan**, kurikulum berfungsi mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk jangkauan yang lebih jauh atau terjun ke masyarakat. Mempersiapkan kemampuan sangat perlu, karena sekolah tidak mungkin memberikan semua apa yang diperlukan atau semua apa yang menarik minat mereka.
5. **Fungsi Pemilihan**, antara keperbedaan dan pemilihan mempunyai hubungan yang erat. Pengakuan atas perbedaan berarti pula diberikan kesempatan bagi seseorang untuk memilih apa yang diinginkan dan menarik minatnya. Ini merupakan kebutuhan yang sangat ideal bagi masyarakat yang demokratis, sehingga kurikulum perlu diprogram secara fleksibel.
6. **Fungsi Diagnostik**, salah satu segi pelayanan pendidikan adalah membantu dan mengarahkan para siswa agar mereka mampu memahami dan menerima dirinya sehingga dapat mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Ini dapat dilakukan bila mereka menyadari semua kelemahan dan kekuatan yang dimiliki melalui eksplorasi dan prognosa.⁴

Fungsi kurikulum dalam mendiagnosa dan membimbing siswa agar dapat mengembangkan potensi siswa secara optimal. Kurikulum dibuat dengan tujuan menjadikannya alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat siswa jadi mengerti tentang sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang diinginkan untuk jenjang selanjutnya. Tujuan disusunnya suatu kurikulum adalah agar terwujudnya pemerataan pendidikan dalam suatu negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat.

Kurikulum terdiri dari empat komponen sebagai berikut.

- 1) Tujuan, yaitu tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Bab II pasal 3 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- 2) Isi (materi), adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar, meliputi apa saja yang berhubungan dengan tujuan pengajaran.

⁴ Kartika, I. M. (2010). Pengertian Peranan Dan Fungsi Kurikulum. *Denpasar: FKIP Universitas Dwijendra Denpasar*, nd, 1-7.

- 3) Proses belajar mengajar, melibatkan dua subjek pendidikan yaitu guru dan peserta didik. Proses belajar mengajar juga memerlukan media atau sarana lain yang memungkinkan proses tersebut berjalan efektif dan efisien.
- 4) Evaluasi, untuk mengetahui hasil dari capaian tiga komponen sebelumnya yang sangat berguna bagi semua pihak untuk melihat sejauh mana keberhasilan interaksi edukatif.⁵

B. Kurikulum Muatan Lokal

Dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0412/U/1987, kurikulum muatan lokal adalah program pendidikan yang isi dan media penyampaian dikaitkan dengan lingkungan alam dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah dan wajib dipelajari oleh murid di daerah tersebut. Isi yang dimaksud yaitu materi pelajaran yang dipilih dan dijadikan program untuk dipelajari oleh peserta didik di bawah bimbingan guru guna mencapai tujuan muatan lokal. Media penyampaian yaitu metode dan berbagai alat bantu pembelajaran yang digunakan dalam menyajikan isi muatan lokal. Isi dan media ini diambil dari lingkungan yang dekat dengan peserta didik.⁶

Keberadaan kurikulum muatan lokal berpijak pada pandangan mengenai inter-relasi pendidikan dan budaya, di mana program pendidikan di sekolah perlu memberikan wawasan yang luas tentang kekhususan yang ada di lingkungannya kepada peserta didik. Isi dan bahan pelajaran muatan lokal ditentukan berdasarkan pada keadaan dan kebutuhan lingkungan, yang dituangkan dalam mata pelajaran dengan alokasi waktu yang berdiri sendiri.

Kurikulum muatan lokal adalah materi pelajaran dan pengenalan dari berbagai ciri khas daerah tertentu, yang tidak hanya terdiri dari keterampilan dan kerajinan tetapi juga manifestasi dari kebudayaan daerah, legenda serta adat istiadat daerah tersebut. Kurikulum muatan lokal ialah program pendidikan yang isi dan media penyampaian dikaitkan dengan lingkungan alam dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah dan wajib dipelajari oleh murid di daerah tersebut.⁷

Muatan lokal berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran yang disusun oleh satuan pendidikan sesuai dengan keragaman potensi daerah, keunggulan daerah, kebutuhan daerah dan lingkungan masing-masing serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.⁸

Pelajaran muatan lokal ini bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik agar memiliki wawasan yang mantap tentang lingkungannya serta sikap dan perilaku dalam rangka melestarikan dan mengembangkan sumber daya alam, kualitas sosial dan kebudayaan yang mendukung pembangunan nasional maupun pembangunan setempat. Diterapkannya muatan lokal di setiap satuan pendidikan dapat dibagi menjadi dua tujuan, yaitu tujuan langsung dan tujuan tidak langsung. Tujuan langsung adalah tujuan yang dapat segera dicapai, di antaranya yaitu bahan pengajaran lebih mudah diserap oleh peserta didik, sumber belajar di daerah dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, peserta didik dapat menerapkan pengetahuan dan

⁵ Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Jakarta, Proyek Pendidikan Tenaga Akademik Ditjen Dikti Depdiknas, 2002, hal. 123.

⁶ Iim Wasliman, *Modul Problematika Pendidikan Dasar*, Bandung, Sekolah Pascasarjana Pendidikan Dasar Universitas Pendidikan Indonesia, 2007, hal. 209.

⁷ Basari, A. (2014, October). Penguatan kurikulum muatan lokal dalam pembelajaran di sekolah dasar. In *Seminar Nasional Ilmu Pendidikan UNS 2014*. Sebelas Maret University.

⁸ Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2011, hal. 205.

keterampilan yang dipelajarinya untuk memecahkan masalah yang terjadi di sekitarnya, peserta didik dapat lebih mengenal kondisi alam, lingkungan sosial dan budaya yang terdapat di sekitarnya. Tujuan tidak langsung merupakan tujuan yang memerlukan waktu yang relatif lama untuk mencapainya, antara lain yaitu meningkatkan pengetahuan peserta didik tentang daerahnya, peserta didik diharapkan dapat menolong orang tua dan dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, peserta didik menjadi lebih dekat secara emosional dengan lingkungannya, serta terhindar dari keterasingan terhadap lingkungannya sendiri.⁹

Secara lebih khusus lagi, kurikulum muatan lokal memiliki tujuan sebagai berikut.

- a) Mengenalkan dan mengakrabkan peserta didik dengan lingkungan alam, sosial dan budayanya.
- b) Membekali peserta didik dengan kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya.
- c) Memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai atau aturan-aturan yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan pembangunan nasional.
- d) Menyadari lingkungan dan masalah-masalah yang ada di masyarakat serta dapat membantu mencari pemecahannya.¹⁰

C. Kebijakan Kurikulum Muatan Lokal dalam Satuan Pendidikan

Kurikulum muatan lokal menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013. Kearifan lokal dan keunikan budaya yang dimiliki setiap daerah memungkinkan daerah untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal bagi sekolah-sekolah yang ada di daerahnya.

Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sementara pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal.¹¹

Berdasarkan Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014, muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik terbentuk pemahamannya terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya. Kemendikbud mendorong kepada pemerintah daerah untuk membuat suatu rancangan kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi dari daerahnya masing-masing.

Muatan lokal berisi materi yang disesuaikan dengan keadaan atau kondisi pada suatu wilayah yang diusulkan kepada pemerintah kabupaten/kota setempat, karena tiap daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda. Usulan tersebut oleh pemerintah kabupaten/kota selanjutnya dianalisis dan diidentifikasi, dilakukan perumusan kompetensi dasar dan menentukan tingkat satuan pendidikan yang sesuai untuk setiap

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Im Wasliman, *Op.Cit.*, hal. 211.

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

kompetensi dasar. Pemerintah kabupaten/kota kemudian menetapkan apakah usulan tersebut dapat menjadi bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri. Penetapan dari pemerintah kabupaten/kota tersebut selanjutnya diusulkan kepada pemerintah provinsi untuk kemudian ditetapkan sebagai kurikulum muatan lokal yang diberlakukan di daerahnya.

Sejumlah daerah di Indonesia telah menetapkan muatan lokal untuk diajarkan kepada peserta didik di daerah.

D. Analisis tentang Kebijakan Kurikulum Muatan Lokal

Penetapan kebijakan tentang kurikulum muatan lokal pada setiap satuan pendidikan menurut penulis dapat menjadi salah satu alternative dalam pengenalan dan penguatan peserta didik terhadap kebudayaan lokal di tempatnya tinggal. Adanya mata pelajaran muatan lokal dapat membuat peserta didik lebih mengenal bagaimana budaya lokal di daerahnya, sehingga menanamkan rasa cinta akan tanah air. Hal ini juga sebagai upaya dalam mengimplementasikan semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kurikulum muatan lokal yang berbeda-beda di tiap daerahnya menjadi wujud keanekaragaman yang dimiliki Indonesia. Dalam hal ini pendidikan juga memiliki peran yang penting dalam memberikan pengetahuan kepada peserta didik mengenai budaya lokal setiap daerah.

Mata pelajaran muatan lokal yang disusun dengan kurikulum pendidikan akan lebih memudahkan bagi pendidik dan peserta didik dalam memahami pola budaya pada daerahnya masing-masing. Penetapan kurikulum muatan lokal yang dilakukan oleh setiap pemerintah daerah juga menjadi wujud dari keselarasan antara komponen pendidikan dengan para penguasa di pemerintah daerah. Selain itu juga dalam rangka melaksanakan peraturan otonomi daerah, di mana pemerintah pusat memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri mengurus daerahnya sendiri termasuk salah satunya dalam bidang pendidikan.

Kendala dalam Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Banyak guru tidak memiliki pemahaman mendalam tentang kearifan lokal dan potensi daerah. Pelatihan khusus untuk pengembangan kurikulum muatan lokal masih terbatas.

b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Sekolah kekurangan bahan ajar, modul, dan alat peraga yang mendukung pembelajaran berbasis lokal. Beberapa daerah tidak memiliki dokumentasi kearifan lokal yang memadai.

c. Minimnya Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder

Kurangnya keterlibatan komunitas adat, praktisi budaya, dan dunia usaha dalam penyusunan kurikulum menyebabkan materi yang diajarkan kurang relevan.

d. Tidak Ada Panduan Kurikulum yang Jelas

Beberapa daerah belum memiliki pedoman resmi dari pemerintah daerah, sehingga sekolah kesulitan merumuskan konten muatan lokal yang terstruktur.

b. Solusi dan Rekomendasi

1. Pelatihan guru khusus muatan lokal berbasis kearifan budaya.
2. Penyusunan bahan ajar kolaboratif dengan melibatkan ahli budaya dan tokoh masyarakat.
3. Peran aktif pemerintah daerah dalam menyediakan pedoman dan pendanaan.
4. Pemanfaatan teknologi untuk pendokumentasian kearifan lokal (e-book, video pembelajaran).

KESIMPULAN

Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis potensi daerah dan kearifan lokal masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal SDM, sarana-prasarana, partisipasi masyarakat, dan regulasi. Untuk mengoptimalkannya, diperlukan sinergi antara sekolah, pemerintah, dan komunitas lokal dalam merancang kurikulum yang kontekstual dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basari, A. 2014. Penguatan kurikulum muatan lokal dalam pembelajaran di sekolah dasar. In Seminar Nasional Ilmu Pendidikan UNS 2014. Sebelas Maret University.
- Huda, N. 2017 . Manajemen pengembangan kurikulum. Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 1(2).
- Iim Wasliman, 2007. Modul Problematika Pendidikan Dasar, Bandung, Sekolah Pascasarjana Pendidikan Dasar Universitas Pendidikan Indonesia.
- Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, 2002. Jakarta, Proyek Pendidikan Tenaga Akademik Ditjen Dikti Depdiknas.
- Nurhasanah, A., Pribadi, R. A., & Nur, M. .2021. Analisis kurikulum 2013. Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang, 7(02).
- Pasal 1 butir 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- Zainal Arifin, 2011. Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum, Bandung, Remaja Rosdakarya.